

Rasionalitas Organisasional dalam Manajemen Tata Kelola Administratif pada UPT. Balai Latihan Kerja Jember

Kamila Nasywa Aulia Hafizhah^{1*}, Ilmiyatul Amaliyah², Lana Afiatun Solihah³,
Mutmainnah⁴

¹⁻⁴Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia
Email: kamilahafizhah42@gmail.com¹, ilmiyamaliyah6@gmail.com², lanafiatuns@gmail.com³,
mutmainnah@uinkhas.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: kamilahafizhah42@gmail.com

Abstract. *Administrative governance in public organizations is facing increasingly complex dynamics due to growing demands for transparency, accountability, and efficiency. Although studies on bureaucracy and public administration continue to develop, attention to operational-level administrative practices remains limited, particularly in job training institutions. This study aims to analyze organizational rationality in administrative governance at UPT. Balai Latihan Kerja Jember, focusing on authority structure, administrative procedures, and the use of technology and its implications for governance effectiveness. This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through non-participant observation and document analysis, and analyzed using data reduction, categorization, and interpretation based on organizational rationality. The findings show that administrative governance is implemented rationally through clear authority structures, standardized procedures, and the use of technology in document management. Technology integration improves efficiency, accessibility, and information traceability, although it still operates alongside conventional systems. This study confirms that organizational rationality is reflected not only in formal rules but also in their consistent implementation. These findings imply the need for more adaptive and accountable administrative governance in public organizations.*

Keywords: *Digitalization; Governance; Organizational Rationality; Public Administration; Weberian Bureaucracy.*

Abstrak. Tata kelola administratif dalam organisasi publik menghadapi dinamika yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi kinerja. Meskipun kajian mengenai birokrasi dan administrasi publik terus berkembang, perhatian terhadap praktik administratif pada level operasional masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks lembaga pelatihan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas organisasional dalam tata kelola administratif pada UPT. Balai Latihan Kerja Jember dengan fokus pada struktur kewenangan, prosedur administratif, serta pemanfaatan teknologi dan implikasinya terhadap efektivitas tata kelola administratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui observasi non-partisipatif dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi, kategorisasi, dan interpretasi menggunakan kerangka rasionalitas organisasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola administratif telah dijalankan secara rasional melalui kejelasan struktur kewenangan, penerapan prosedur yang terstandarisasi, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dokumen. Integrasi teknologi berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keterlacakan informasi, meskipun masih berjalan berdampingan dengan sistem konvensional. Penelitian ini menegaskan bahwa rasionalitas organisasional tidak hanya tercermin dalam aturan formal, tetapi juga dalam konsistensi implementasinya dalam praktik administratif. Temuan ini memberikan implikasi bagi pengembangan tata kelola administratif yang lebih adaptif dan akuntabel dalam organisasi publik.

Kata Kunci: Administrasi Publik; Birokrasi Weberian; Digitalisasi; Rasionalitas Organisasi; Tata Kelola.

1. LATAR BELAKANG

Tata kelola administratif dalam organisasi publik saat ini menghadapi dinamika yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi kinerja (Khotimah et al., 2025). Kondisi ini mendorong terjadinya pergeseran peran administrasi yang semakin signifikan. Administrasi tidak lagi dipahami sekadar sebagai

aktivitas teknis, melainkan sebagai instrumen strategis dalam menentukan kualitas layanan serta legitimasi institusi publik (Nur et al., 2024; Surbakti et al., 2026). Dalam kondisi tersebut, pengelolaan administrasi dituntut menjadi lebih sistematis, adaptif, dan terintegrasi guna mendukung proses pengambilan keputusan serta peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Sejalan dengan tuntutan tersebut, pengelolaan administrasi yang baik diharapkan mampu menciptakan sistem kerja yang tertib, konsisten, dan terkoordinasi secara efektif (Adelia et al., 2025). Pengelolaan administrasi yang baik juga berperan dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas implementasi ekonomi syariah, sehingga turut mendorong stabilitas ekonomi secara lebih luas (Mutmainnah & Yuwana, 2024). Namun, pada praktiknya berbagai permasalahan administratif masih terjadi, seperti ketidakteraturan sistem pengarsipan dan inkonsistensi prosedur surat-menyurat (Henri & Nasir, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola administratif belum optimal, sekaligus mencerminkan bahwa praktik administratif tidak sekadar bersifat teknis, melainkan berkaitan dengan dinamika operasional organisasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan kerangka analitis yang mampu menjelaskan praktik administratif dalam kaitannya dengan struktur organisasi, aturan formal, serta mekanisme kerja yang mendasarinya.

Secara konseptual, rasionalitas organisasional dalam administrasi publik berakar pada pemikiran Max Weber yang menekankan pentingnya struktur hierarkis, aturan formal, serta pembagian kerja dalam menciptakan efisiensi organisasi (Fauzan, 2024; Husyam et al., 2026; Tania et al., 2025). Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip tersebut kemudian dikaji dalam berbagai penelitian empiris yang menelaah penerapannya dalam praktik organisasi. Studi mengenai birokrasi dalam organisasi pendidikan menunjukkan bahwa penerapan pembagian kerja, hierarki, dan aturan rasional mampu menciptakan konsistensi serta meningkatkan kualitas layanan, meskipun berpotensi menimbulkan rigiditas dalam praktiknya (Devi et al., 2023). Temuan lain juga menegaskan bahwa *ideal type* birokrasi Weberian berkontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas manajemen melalui pengambilan keputusan berbasis aturan objektif dan spesialisasi tugas yang jelas, sekaligus menunjukkan adanya pergeseran menuju praktik birokrasi yang lebih adaptif dalam konteks administrasi publik yang lebih luas (Anas & Hanani, 2024; Mozin et al., 2025). Pergeseran ini juga diperkuat oleh penerapan prinsip *good governance* yang mendorong kepatuhan administratif serta tata kelola yang transparan, akuntabel, dan efektif, meskipun tetap dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan budaya birokrasi yang kaku (Pratiwi et al., 2015; Septiana et al., 2026). Pada level yang lebih luas, tata kelola administrasi turut memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme

kelembagaan. Dalam konteks ini, administrasi publik tidak hanya dipahami sebagai sistem teknis, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menuntut rasionalitas dan integritas dalam pelaksanaannya (Satriyono et al., 2025; Sumarno & Amin, 2025).

Meskipun kajian tentang birokrasi dan administrasi publik terus berkembang, perhatian terhadap praktik pada level operasional organisasi masih menunjukkan keterbatasan. Kondisi ini tercermin dari dominasi pendekatan konseptual dan normatif dalam penelitian, yang belum sepenuhnya mampu menggambarkan penerapan prinsip rasionalitas organisasional dalam praktik administratif sehari-hari (Anas & Hanani, 2024; Devi et al., 2023; Mozin et al., 2025; Sumarno & Amin, 2025). Selain itu, fokus penelitian yang lebih banyak diarahkan pada sektor pendidikan dan organisasi berbasis komunitas menyebabkan konteks lembaga pelatihan kerja sebagai bagian dari pelayanan publik masih relatif kurang mendapatkan perhatian (Satriyono et al., 2025; Septiana et al., 2026). Dalam konteks tersebut, lembaga pelatihan kerja sebagai organisasi publik operasional menjadi relevan untuk dikaji, terutama dalam memahami bagaimana praktik tata kelola administratif dijalankan dalam aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan kerangka tersebut, pemilihan UPT. Balai Latihan Kerja Jember sebagai objek penelitian didasarkan pada karakteristiknya sebagai institusi publik operasional yang memiliki intensitas aktivitas administratif yang tinggi, khususnya dalam pengelolaan dokumen, pelayanan pelatihan, serta koordinasi antarunit kerja, sehingga merepresentasikan konteks yang relevan untuk mengkaji dinamika tata kelola administratif pada level operasional. Penelitian ini menganalisis rasionalitas organisasional dalam tata kelola administratif pada UPT. Balai Latihan Kerja Jember dengan fokus pada struktur kewenangan, prosedur administratif, dan pemanfaatan teknologi. Analisis ini diarahkan untuk memahami bagaimana praktik administratif dijalankan pada level operasional dalam konteks organisasi publik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menjelaskan keterkaitan praktik tersebut dengan prinsip rasionalitas organisasional, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan tata kelola administratif yang lebih rasional dan adaptif.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep rasionalitas organisasional dalam tata kelola administratif berakar pada pemikiran Max Weber mengenai otoritas legal rasional, yang menempatkan aturan formal sebagai sumber utama legitimasi dalam organisasi (Wicaksono & Aji, 2025). Dalam perspektif ini, birokrasi dipahami sebagai bentuk organisasi yang ditopang oleh struktur hierarkis, pembagian kerja yang sistematis, serta penggunaan dokumentasi tertulis sebagai instrumen pengendalian administratif (Hadi, 2024). Rasionalitas tidak semata dimaknai sebagai efisiensi

teknis, tetapi juga mencerminkan keteraturan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam pelaksanaan aktivitas organisasi (Schmitz & Bryson, 2025).

Dalam kerangka tersebut, struktur kewenangan dan prosedur administratif berfungsi sebagai mekanisme koordinasi dan kontrol yang memastikan setiap aktivitas berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Fauzan, 2020). Dokumentasi administratif memiliki posisi strategis sebagai basis informasi dalam pengambilan keputusan sekaligus sebagai instrumen untuk menjaga akuntabilitas organisasi (Chappidi et al., 2025). Dengan demikian, rasionalitas organisasional tidak hanya terletak pada keberadaan aturan formal, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam mengoperasionalkan aturan tersebut secara konsisten dalam praktik sehari-hari.

Pemikiran Max Weber dalam *Economy and Society* menegaskan bahwa organisasi tidak dapat dipahami semata sebagai struktur yang statis, melainkan sebagai rangkaian tindakan sosial yang berlangsung secara berkelanjutan (Fauzan et al., 2024; Weber, 2019). Perspektif ini menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola administratif tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan, tetapi juga oleh dinamika implementasi dalam praktik operasional (Walahe et al., 2026). Oleh karena itu, analisis terhadap rasionalitas organisasional perlu diarahkan pada bagaimana struktur kewenangan, prosedur administratif, serta sistem dokumentasi dijalankan secara konkret dalam aktivitas organisasi.

Dalam konteks perkembangan administrasi publik kontemporer, digitalisasi turut memperluas dimensi rasionalitas organisasional melalui pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan informasi (Agustin et al., 2025). Integrasi sistem digital memungkinkan peningkatan efisiensi, transparansi, dan keterlacakan dokumen, tanpa menghilangkan peran struktur formal sebagai fondasi utama organisasi (Rakhman, 2024). Dalam kerangka tersebut, digitalisasi tidak menggantikan prinsip birokrasi Weberian, melainkan memperkuat kapasitasnya dalam menjawab tuntutan tata kelola administratif yang semakin kompleks dan dinamis (Kasim et al., 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami bahwa tata kelola administratif dalam organisasi publik tidak semata ditentukan oleh keberadaan prosedur formal, tetapi juga oleh konsistensi implementasinya dalam praktik operasional. UPT. Balai Latihan Kerja (BLK) Jember, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja yang berada di bawah naungan dan koordinasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans Prov. Jatim), dipilih sebagai lokasi penelitian karena

karakteristiknya sebagai institusi publik yang menjalankan fungsi pelayanan dan pelatihan dengan intensitas aktivitas administratif yang tinggi, sehingga relevan sebagai konteks empiris untuk mengkaji dinamika tersebut. Fokus kajian mencakup struktur kewenangan, penerapan prosedur administratif berbasis aturan, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem administrasi dan implikasinya terhadap efektivitas tata kelola administratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengeksplorasi praktik administratif dalam konteks alaminya, sekaligus mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan logika operasional yang mendasari tata kelola administratif dalam organisasi publik (Munawaroh & Amanda, 2025).

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang dipilih secara *purposive* berdasarkan relevansinya dengan fokus kajian (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas administratif, meliputi pengelolaan surat, penyimpanan arsip, dan alur distribusi dokumen. Data sekunder bersumber dari dokumen administratif yang digunakan dalam praktik operasional organisasi, seperti struktur organisasi, laporan kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan pelaksanaan administrasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipatif dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk menangkap praktik administratif dalam keseharian organisasi, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk menelusuri kerangka normatif yang mendasarinya (Zahroh et al., 2025). Kombinasi ini menghasilkan gambaran yang tidak hanya operasional, tetapi juga struktural.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, kategorisasi, dan interpretasi secara sistematis (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data kemudian dikategorikan ke dalam tema-tema utama yang mencerminkan dimensi tata kelola administratif, seperti struktur kewenangan, implementasi prosedur, dan integrasi teknologi. Interpretasi dilakukan dengan menggunakan kerangka rasionalitas organisasional untuk memahami pola praktik administratif yang muncul. Hasil analisis diharapkan memberikan pemahaman yang lebih terstruktur dan konseptual terhadap dinamika tata kelola administratif dalam konteks institusional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Kewenangan dalam Perspektif Rasionalitas Organisasional

Dalam perspektif otoritas legal-rasional menurut Max Weber, struktur hierarkis dan pembagian kewenangan yang jelas merupakan prasyarat utama dalam menciptakan keteraturan dan efisiensi organisasi (Weber, 2019). Struktur tersebut menempatkan legitimasi pada jabatan

formal, sehingga kewenangan dijalankan berdasarkan aturan, bukan pada individu. Dalam konteks empiris, struktur kewenangan dalam tata kelola administratif pada UPT. Balai Latihan Kerja Jember telah tersusun secara jelas sesuai dengan posisi struktural masing-masing, di mana setiap jabatan memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik dalam proses pengambilan keputusan. Legitimasi administratif melekat pada jabatan formal, sehingga kewenangan yang dijalankan tidak bersifat personal, melainkan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan kesesuaian dengan prinsip rasionalitas Weberian, di mana struktur hierarkis berfungsi sebagai dasar operasional organisasi. Dalam praktiknya, kejelasan struktur kewenangan tersebut berperan sebagai mekanisme pengendalian internal yang mampu menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan administratif serta meminimalkan penyimpangan dalam organisasi. Implikasinya, struktur yang terorganisasi secara rasional tidak hanya meningkatkan keteraturan kerja, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, sejalan dengan temuan penelitian yang menekankan pentingnya struktur kekuasaan birokrasi dalam menjaga efektivitas organisasi modern (Devi et al., 2023).

Selain itu, implementasi struktur kewenangan yang jelas turut mendukung terciptanya sistem kerja yang lebih tertib dan terkoordinasi dalam tata kelola administratif. Pembagian peran yang tegas memungkinkan setiap pegawai memahami tanggung jawabnya, sehingga proses administrasi berjalan lebih sistematis dan minim kesalahan (Rahman, 2024). Secara konseptual, kondisi ini mencerminkan fungsi struktur birokrasi sebagai instrumen kontrol dalam menjaga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Hasil ini didukung oleh studi yang menegaskan bahwa struktur kewenangan yang jelas dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas organisasi publik (Firdaus et al., 2024).

Selanjutnya, digitalisasi administrasi memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan pengelolaan data dilakukan secara lebih sistematis dan mudah diakses, sehingga mendukung kelancaran proses kerja administratif. Dalam kerangka rasionalitas organisasional, pemanfaatan teknologi dapat dipahami sebagai perluasan instrumen rasional dalam meningkatkan efisiensi dan ketepatan pengambilan keputusan (Pandowo et al., 2023). Temuan empiris di UPT BLK Jember menunjukkan bahwa digitalisasi telah mulai diintegrasikan dalam sistem administrasi, sehingga mempercepat alur informasi dan meningkatkan akurasi data. Hal ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa transformasi digital mampu meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi publik (Lukman et al., 2024).

Penguatan Tata Kelola Administratif melalui Standarisasi Prosedur

Secara teoritis, dalam perspektif administrasi publik, tata kelola administratif yang efektif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan prosedur formal, tetapi juga oleh konsistensi penerapannya dalam praktik operasional sehari-hari (Putri et al., 2025). Standarisasi prosedur berfungsi sebagai instrumen pengendalian organisasi yang memastikan setiap aktivitas berjalan secara sistematis, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan (Malkab & Syurkati, 2025). Dalam kerangka ini, prosedur administratif seperti sistem penomoran surat, mekanisme verifikasi, serta proses legitimasi formal merupakan bentuk konkret dari rasionalitas organisasional dalam menjaga keteraturan dan akuntabilitas dokumen.

Dalam konteks empiris, praktik tata kelola administratif di UPT. Balai Latihan Kerja Jember menunjukkan bahwa aktivitas administrasi telah dijalankan melalui mekanisme yang relatif terstruktur. Pengelolaan surat keluar dilaksanakan melalui tahapan prosedural yang mencakup verifikasi substansi dokumen, penyesuaian format, serta pemberian nomor surat secara berurutan sebelum memperoleh pengesahan dari pejabat berwenang. Proses ini mencerminkan penerapan sistem kerja yang terstruktur dan terkontrol, sekaligus menunjukkan adanya mekanisme pengendalian administratif yang berfungsi untuk menjaga konsistensi dan keteraturan dokumen. Selain itu, penggunaan tanda tangan dan stempel resmi menegaskan bahwa setiap dokumen telah melalui proses legitimasi formal yang jelas.

Ditinjau dari perspektif rasionalitas organisasional, praktik tersebut menunjukkan kesesuaian dengan prinsip rasionalitas organisasional, khususnya dalam hal penggunaan prosedur sebagai instrumen pengendalian administratif. Penerapan sistem penomoran surat, verifikasi dokumen, serta legitimasi formal merepresentasikan bentuk konkret dari mekanisme rasional yang bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan keteraturan organisasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa standarisasi prosedur administratif berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan konsistensi dalam organisasi publik (Malkab & Syurkati, 2025). Namun demikian, dalam kondisi tertentu, penerapan prosedur yang terstandarisasi berpotensi menimbulkan rigiditas administratif, khususnya ketika prosedur dijalankan secara kaku tanpa mempertimbangkan dinamika kebutuhan operasional. Dalam praktiknya, rigiditas tersebut dapat tercermin, misalnya, pada lamanya proses persetujuan dokumen akibat tahapan verifikasi berjenjang, atau keterbatasan fleksibilitas dalam menyesuaikan format administrasi dengan kebutuhan situasional. Kondisi ini berimplikasi pada perlambatan alur kerja administratif, terutama dalam situasi yang membutuhkan respons cepat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepatuhan

terhadap prosedur formal dan fleksibilitas operasional, sehingga standar administratif tetap terjaga tanpa menghambat efektivitas kinerja organisasi.

Dalam konteks tersebut, penggunaan sistem konvensional dan digital secara bersamaan menunjukkan adanya kelebihan dan keterbatasan masing-masing pendekatan. Sistem konvensional memiliki keunggulan dalam aspek legalitas formal dan keamanan dokumen fisik, terutama dalam menjamin keabsahan dokumen melalui tanda tangan dan stempel resmi. Namun, sistem ini cenderung kurang efisien dalam hal penyimpanan, pencarian, dan distribusi dokumen. Sebaliknya, sistem digital menawarkan keunggulan dalam efisiensi waktu, kemudahan akses, serta keterlacakan informasi secara *real-time*, meskipun masih menghadapi tantangan dalam aspek keamanan data, kesiapan infrastruktur, serta adaptasi sumber daya manusia. Dengan demikian, kombinasi kedua sistem tersebut mencerminkan strategi transisional organisasi dalam mengoptimalkan keunggulan masing-masing sistem, sekaligus meminimalkan keterbatasannya.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola administratif di UPT. Balai Latihan Kerja Jember telah memiliki fondasi yang cukup kuat melalui penerapan standarisasi prosedur. Namun demikian, optimalisasi masih diperlukan, khususnya dalam meningkatkan konsistensi implementasi prosedur serta memperkuat integrasi antara sistem administrasi konvensional dan digital. Dengan demikian, pengembangan sistem yang lebih adaptif menjadi penting guna menjawab tuntutan administratif yang semakin kompleks di masa mendatang.

Transformasi Digital dalam Sistem Administrasi Organisasi Publik

Dalam perspektif administrasi publik kontemporer, transformasi digital dipahami sebagai upaya strategis organisasi dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas melalui pemanfaatan teknologi informasi (Mashudin, 2025). Digitalisasi tidak hanya merepresentasikan perubahan teknis dari sistem manual ke elektronik, tetapi juga mencerminkan pergeseran dalam pola kerja organisasi yang menjadi lebih sistematis, terdokumentasi, dan terintegrasi (Andesca & Abdal, 2025). Dalam kerangka rasionalitas organisasional, pemanfaatan teknologi berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas administratif tanpa menghilangkan peran struktur formal sebagai dasar legitimasi organisasi (Dewi, 2025; Syahrizal et al., 2026). Dengan demikian, transformasi digital tidak menggantikan sistem birokrasi yang ada, melainkan memperkuat efektivitasnya melalui peningkatan aksesibilitas dan keterlacakan informasi (Choirunnissa & Oktarina, 2025).

Temuan empiris pada UPT. Balai Latihan Kerja Jember menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam sistem administrasi telah mulai diterapkan, khususnya dalam pengelolaan dokumen dan pengarsipan. Digitalisasi memungkinkan setiap dokumen administratif dicatat secara lebih sistematis, sehingga mempermudah proses pencarian, distribusi, dan pengendalian informasi. Selain itu, pemanfaatan sistem elektronik juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, karena setiap aktivitas administratif dapat ditelusuri secara digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi telah mengadopsi teknologi sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas tata kelola administratif.

Ditinjau dari perspektif rasionalitas organisasional, praktik tersebut merefleksikan pemanfaatan teknologi sebagai instrumen penguatan sistem administratif, khususnya dalam aspek efisiensi dan akuntabilitas. Digitalisasi memungkinkan pengurangan kesalahan dalam pencatatan manual serta mempercepat alur distribusi informasi antarunit kerja. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa transformasi digital berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi publik melalui sistem informasi yang lebih terintegrasi (Fadri, 2024; Makalalag & Maramis, 2025).

Namun demikian, implementasi digitalisasi di UPT. Balai Latihan Kerja Jember menunjukkan bahwa proses integrasi sistem masih berada dalam tahap penguatan. Praktik administrasi memperlihatkan adanya kombinasi antara sistem konvensional dan digital yang berjalan secara simultan, di mana dokumen fisik tetap dipertahankan sebagai arsip utama, sementara sistem digital digunakan sebagai pelengkap dalam proses dokumentasi. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa transformasi digital berlangsung secara bertahap, sejalan dengan kebutuhan organisasi dalam menjaga keberlanjutan sistem administrasi yang telah berjalan sebelumnya. Dalam konteks ini, keberadaan sistem kombinatorik tidak menunjukkan kelemahan, melainkan merepresentasikan strategi adaptif organisasi dalam mengelola transisi menuju sistem administrasi berbasis digital yang lebih terintegrasi.

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa proses transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga menyangkut kesiapan organisasi dalam mengintegrasikan sistem kerja secara menyeluruh. Keberadaan sistem konvensional yang tetap dipertahankan mencerminkan upaya organisasi dalam menjaga aspek legalitas dan keamanan dokumen, khususnya dalam konteks administrasi publik yang menuntut tingkat akuntabilitas yang tinggi. Di sisi lain, pemanfaatan sistem digital memberikan nilai tambah dalam efisiensi pengelolaan informasi, kemudahan akses, serta peningkatan keterlacakan dokumen dalam aktivitas administratif sehari-hari. Meskipun demikian, secara konseptual, penerapan sistem arsip digital secara penuh memungkinkan untuk diwujudkan, sepanjang didukung oleh

kesiapan infrastruktur teknologi, regulasi yang memadai, serta kompetensi sumber daya manusia. Implementasi sistem digital secara menyeluruh berpotensi meningkatkan efektivitas tata kelola administratif secara signifikan, terutama dalam aspek efisiensi operasional dan transparansi. Namun, dalam konteks empiris, penerapan tersebut memerlukan proses adaptasi bertahap guna memastikan keberlanjutan sistem serta meminimalkan risiko dalam pengelolaan dokumen.

Dalam perspektif rasionalitas organisasional, kondisi ini merefleksikan bahwa organisasi tidak hanya berorientasi pada efisiensi teknis, tetapi juga pada stabilitas dan keberlanjutan sistem administratif. Integrasi antara sistem konvensional dan digital menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan inovasi dan kebutuhan akan kepastian prosedural. Dengan demikian, digitalisasi tidak serta-merta menggantikan sistem yang telah ada, melainkan berperan sebagai instrumen pelengkap yang memperkuat kapasitas organisasi dalam menjalankan fungsi administratif secara lebih efektif dan terkontrol.

Sejalan dengan dinamika tersebut, keberlanjutan proses transformasi digital ini membuka ruang bagi pengembangan sistem administrasi yang lebih terintegrasi di masa mendatang. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dapat diarahkan pada penguatan interoperabilitas antarunit kerja, peningkatan konsistensi penggunaan sistem digital, serta pengembangan standar operasional yang mendukung integrasi data secara menyeluruh. Dalam konteks ini, penguatan digitalisasi tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga berkontribusi dalam membangun tata kelola administratif yang lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika organisasi publik. Dengan demikian, transformasi digital dalam tata kelola administratif pada UPT. Balai Latihan Kerja Jember menunjukkan karakteristik sebagai proses yang berkembang secara bertahap dan berkelanjutan. Kondisi ini sekaligus menegaskan bahwa rasionalitas organisasional tidak hanya tercermin dalam adopsi teknologi, tetapi juga dalam kemampuan organisasi untuk mengelola perubahan secara terstruktur, sistematis, dan selaras dengan kebutuhan administratif yang terus berkembang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola administratif pada UPT. Balai Latihan Kerja Jember telah merefleksikan prinsip rasionalitas organisasional melalui penerapan struktur kewenangan yang jelas, prosedur administratif yang terstandarisasi, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem administrasi. Struktur kewenangan yang berbasis jabatan formal memungkinkan distribusi tugas dan pengambilan keputusan berlangsung secara sistematis, sehingga mendukung keteraturan dan konsistensi aktivitas administratif. Penerapan prosedur

administratif, khususnya dalam pengelolaan surat keluar dan pengarsipan dokumen, memperlihatkan mekanisme kerja yang terstandarisasi melalui tahapan verifikasi, penomoran, dan legitimasi formal. Praktik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian administratif, tetapi juga sebagai upaya menjaga akuntabilitas organisasi. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dokumen tidak hanya meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keterlacakan informasi, tetapi juga memberikan implikasi terhadap peningkatan efektivitas tata kelola administratif, meskipun implementasinya masih berjalan berdampingan dengan sistem konvensional. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa tata kelola administratif telah dijalankan secara rasional pada level operasional, sekaligus menunjukkan kemampuan adaptif organisasi dalam merespons dinamika kebutuhan administratif yang semakin kompleks.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan pemahaman empiris mengenai rasionalitas organisasional dalam praktik tata kelola administratif pada level operasional organisasi publik. Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa rasionalitas organisasional tidak hanya tercermin dalam keberadaan struktur dan aturan formal, tetapi juga dalam konsistensi implementasinya dalam aktivitas administratif sehari-hari. Secara metodologis, penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap praktik administratif dalam konteks alaminya, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara struktur, prosedur, dan teknologi dalam organisasi. Selain itu, penelitian ini memperluas konteks kajian administrasi publik dengan menghadirkan lembaga pelatihan kerja sebagai focus empiris yang masih relatif terbatas dalam studi sebelumnya. Temuan ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam memahami bagaimana prinsip birokrasi Weberian dioperasionalkan secara adaptif dalam menghadapi dinamika organisasi publik kontemporer.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang sekaligus membuka ruang bagi pengembangan studi selanjutnya. Pertama, fokus penelitian yang terbatas pada satu institusi menyebabkan temuan belum dapat digeneralisasikan secara luas pada konteks organisasi publik lainnya. Kedua, pendekatan kualitatif yang digunakan lebih menekankan pada deskripsi praktik, sehingga belum mengukur tingkat efektivitas tata kelola administratif secara kuantitatif. Ketiga, pengumpulan data yang berfokus pada observasi dan dokumentasi belum sepenuhnya menggali perspektif subjektif aktor organisasi secara mendalam. Keempat, analisis penelitian masih terbatas pada tiga aspek utama, yaitu struktur kewenangan, prosedur administratif, dan pemanfaatan teknologi, sehingga dimensi lain seperti budaya organisasi dan kepemimpinan belum terakomodasi secara komprehensif. Kelima, implementasi digitalisasi

yang diamati masih berada pada tahap awal integrasi, sehingga belum mampu menggambarkan sistem digital yang sepenuhnya matang. Keenam, keterbatasan waktu penelitian berpengaruh pada kedalaman pengamatan terhadap dinamika administratif yang bersifat jangka panjang. Ketujuh, penelitian ini belum mengkaji secara spesifik dampak tata kelola administratif terhadap kualitas layanan publik yang dihasilkan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas konteks studi, mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta mengintegrasikan variabel lain yang relevan guna menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam.

DAFTAR REFERENSI

- Adelia, N., Amal, A. I., & Hidayah, H. F. (2025). Peran Manajemen Perkantoran dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(3), 181–192. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i3.1178>
- Agustin, R., Januar, N. V., Maharani, D. A., Septiyena, E. D., Jumiati, & Saputra, B. (2025). Digitalisasi Administrasi Publik: Peluang, Tantangan, dan Model Implementasi dalam Konteks Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, 3(6), 1030–1034. <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/jishs.v3i6.3110>
- Anas, R., & Hanani, S. (2024). Idealtipe Birokrasi Weberian Dalam Sistem Pendidikan: Implikasi Terhadap Efisiensi dan Efektivitas Manajemen. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 128–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i1.1174>
- Andesca, C. P., & Abdal. (2025). SPBE DAN MODERNISASI BIROKRASI: KAJIAN LITERATUR MENGENAI TANTANGAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL DAN GOVERNANCE DIGITAL. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11(9), 271–280.
- Chappidi, S., Cobbe, J., Norval, C., Mazumder, A., & Singh, J. (2025). Accountability Capture: How Record-Keeping to Support AI Transparency and Accountability (Re)shapes Algorithmic Oversight Shreya. *Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society*, 8(1), 554–566. <https://doi.org/https://doi.org/10.1609/aies.v8i1.36570>
- Choirunnissa, N. F., & Oktarina, N. (2025). PERAN DIGITALISASI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRATIF KANTOR. *Bookchapter Administrasi Perkantoran*, 1, 77–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/bap.v1i1.278>
- Devi, I., Hanani, S., Syafitri, A., Indri, N., & Harahap, Y. (2023). Birokrasi dan Struktur Kekuasaan dalam Organisasi Pendidikan Modern: dengan Pendekatan Max Weber. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(4), 268–281. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/concept.v2i4.790>
- Dewi, S. (2025). Model Rekonstruksi Arsip Berbasis Teknologi Informasi untuk Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(4), 1345–1356. <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/xsk1e894>

- Fadri, Z. (2024). Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Administrasi Publik. In *Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital* (hal. 61–62).
- Fauzan. (2020). *SISTEM INFORMASI MANAJEMEN: SEBUAH PENGANTAR*. BILDUNG.
- Fauzan. (2024). *Sistem Pengendalian Manajemen*. INDIGO MEDIA.
- Fauzan, Fitriyah, N. S., & Zain, M. H. (2024). *BIROKRASI DAN PUBLIK GOVERNANCE*. CV. ISTANA AGENCY.
- Firdaus, Nur, M., Haeril, & Hidayatullah, A. (2024). Transformasi Organisasi: Membangun Budaya Inovasi Untuk Kesuksesan Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JSIM)*, 4(6), 844–853. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.325>
- Hadi, M. S. (2024). Teori Organisasi Klasik. *JJIMAD: Jurnal Ilmiah Mutiara Pendidikan*, 2(4), 80–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.61404/jimad.v2i4.338>
- Henri, & Nasir. (2025). Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Layanan Administrasi di SMK Negeri 3 Makassar. *Majalah Ilmiah METHODA*, 15(2), 173–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.46880/methoda.Vol15No2.pp173-180>
- Husyam, Intan, L. N., & Junita, R. (2026). Rasionalitas Weberian dalam Pemerintahan Modern : Tantangan Birokrasi dan Kebijakan Publik. *JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(6), 4050–4062. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jim.v4i6.1744>
- Kasim, B., Ferriswara, D., & Haryati, E. (2025). Digital Transformation In Public Services : A Literature Review On Bureaucratic Innovation And Adaptation In The Era Of Digital Government. *International Journal of Social Science and Humanity*, 2(4), 105–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.62951/ijss.v2i4.523>
- Khotimah, K., Dayar, M. B., Ilyasi, A., Chilmy, N. W., Hikmah, F. N., Sunarto, I., & Mayasari, N. (2025). *ADMINISTRASI PUBLIK Birokrasi Menuju Transformasi Digital*. Penerbit Widina Media Utama.
- Lukman, Pratiwi, J., & Sakir, A. R. (2024). Transformasi Digital Dalam Administrasi Publik : Peluang Dan Tantangan. *Jurnal of Global and Multidisciplinary*, 2(1), 1042–49.
- Makalalag, R. R., & Maramis, G. D. P. (2025). Implementasi Sistem Manajemen Dokumen Cloud di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa. *REMIK: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 9(3), 1100–1109. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/remik.v9i3.15154>
- Malkab, H., & Syurkati, K. K. (2025). Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Transformasi Digital dan Kerja Sama Antar Lembaga : Strategi Menuju Indonesia Emas 2045. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(4), 278–294. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/hukum.v2i4.653>
- Mashudin, A. (2025). Transformasi Administrasi Publik Di Era Digital : Inovasi Dan Tantangan. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(1), 449–456.

- Mozin, S. Y., Badjuka, A. H., Andini, Y. T., Fitra, R., & Nadia, S. R. (2025). Dari Rasionalitas Weberian ke Birokrasi Adaptif: Evolusi Paradigma Administrasi Modern. *Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI*, 22(2), 109–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.56444/mia.v22i2.3261>
- Munawaroh, K., & Amanda, S. D. (2025). Hubungan antara Lingkungan Organisasi dan Administrasi dalam Penggunaan Sistem Informasi Manajemen: Studi Etnografi pada Instansi Pemerintah. *Journal of Government and Social Issues (JGSI)*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/jgsi.v5i1.45>
- Mutmainnah, & Yuwana, S. I. P. (2024). Strategi Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/jebi.v4i1.2694>
- Nur, M., Fitriani, A., Usulu, E. M., & Mahardhani, A. J. (2024). *INOVASI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Pandowo, A., Nggilu, R., Senoaji, F., Badruddin, S., Syamsuadi, A., Pratiwi, Halim, P., Nur, B., Suryaningsih, A. D., Novita, D., Kereh, H. F., & Falimu. (2023). *DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK*. PT. ADIKARYA PRATAMA GLOBALINDO.
- Pratiwi, A., Nurkholis, & Ghofar, A. (2015). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP ASIMETRI INFORMASI. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 19(2), 99–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art2>
- Putri, S. M. A. J., Abidin, Z., Kurniawan, & Munip, A. (2025). Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik melalui Pendampingan Tata Kelola. *JALHu: Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 11(02), 182–189.
- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Rahman, H. (2024). REFORMASI BIROKRASI: KORUPSI DALAM BIROKRASI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(1), 135–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jiapd.v14i1.2735>
- Rakhman, A. A. (2024). Tinjauan Sistematis Tentang Pengaruh Digitalisasi Pengadaan Terhadap Efisiensi dan Transparansi di Sektor Publik Indonesia. *Jurnal Pengadaan Indonesia*, 3(2), 78–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.59034/jpi.v3i2.53>
- Satriyono, G., Rukmini, M., Eferyn, K., Alfiona, F. N., & Utama, M. B. B. (2025). Tata Kelola Manajemen Administrasi Pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Tani Makmur Tulungagung. *Jurnal ABM Mengabdikan*, 12(2), 110–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.31966/jam.v12i2.1757>
- Schmitz, C., & Bryson, J. (2025). A Moral Agency Framework for Legitimate Integration of AI in Bureaucracies. *In Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society*, 8(3), 2292–2293. <https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.08231>

- Septiana, I., Muhammad, & Agus. (2026). KEPEMIMPINAN BIROKRATIS, GOOD GOVERNANCE, TATA KELOLA MADRASAH, DAN KEPATUHAN ADMINISTRASI. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 9(1), 121–153. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/politea.v9i1.15050>
- Sumarno, D. A., & Amin, M. (2025). DIMENSI FILOSOFIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN: Rekonstruksi Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Administrasi Publik untuk Reformasi Birokrasi Berkelanjutan. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 10(03), 112–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.40388>
- Surbakti, B. T. A., Sambuardi, R., & Azmi. (2026). Efektivitas Pengelolaan Administrasi Di BMPG (Badan Masyawarah Pengurus Guru) TPQ Kabupaten Karimun. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 3089–3099. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4747>
- Syahrizal, R. A., Rizal, W. K., & Sijabat, R. (2026). STRATEGI PERUSAHAAN DALAM MELAKUKAN PERUBAHAN UNTUK MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG FIT TERHADAP STRATEGI PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN EKSTERNAL. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/c81nac47>
- Tania, N. E., Puspita, D., Sari, A. K., Febriana, A. N. A., & Sari, F. N. (2025). RELEVANSI BIROKRASI WEBERIAN TERHADAP PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI INDONESIA. *PARADIGMA: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(2), 192–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.65124/prdm.v14i2.233>
- Walahe, D., Kau, F. R., Hadi, A., Ahmad, H., Andara, I., Siama, W., Yobee, A., & Darise, D. (2026). Analisis Teori Birokrasi Max Weber dalam Konteks Administrasi Publik Modern. *JPIM (Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner)*, 03(01), 417–423.
- Weber, M. (2019). *Economy and Society: A New Translation*. Harvard University Press.
- Wicaksono, I., & Aji, M. P. (2025). Weber's Ideal Bureaucracy Implementation in the Secretariat Bureau of Headship at the Secretariat General of the Regional Representative Council. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 16(1), 69–84. <https://doi.org/10.23960/administratio.v16i1.483>
- Zahroh, N. I., Nasution, L. A., Tazqia, A. D., Faiha, H. A. I., & Nurhayati, D. (2025). STRATEGI PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN KUALITATIF: TEKNIK, TANTANGAN DAN SOLUSINYA. *TARBIYATUL ILMU: Jurnal Kajian Pendidikan*, 3(6), 107–118.